

R E N S T R A

RENCANA STRATEGIS

**BPS KABUPATEN MALUKU TENGGARA
TAHUN 2015-2019**



BPS KABUPATEN MALUKU TENGGARA

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2015-2019 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS Kabupaten Maluku Tenggara 5 (lima) tahun ke depan, dimana pembangunan yang baik adalah yang dilakukan secara teratur dan terstruktur yang ditunjang dengan sebuah perencanaan yang matang, sehingga menghasilkan pembangunan yang maksimal, efektif dan efisien.

Penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh jajaran BPS Kabupaten Maluku Tenggara yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Renstra BPS Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2015-2019, semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat bagi semua pihak.

Langgur, 31 Juli 2015

Kepala BPS Kabupaten Maluku Tenggara

Johnny Tuhumury

RINGKASAN EKSEKUTIF

Untuk menyongsong pembangunan nasional jangka menengah periode ke-3 tahun 2015-2019, BPS menyusun strategis sebagai rujukan dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan, dimana penyediaan data statistik yang berkualitas menjadi sangat menentukan karena akan berdampak kepada efektifitas pengambilan keputusan yang dilakukan. Karena itu, diperlukan perencanaan yang baik untuk menentukan arah kebijakan dan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan hingga terwujudnya visi BPS Kabupaten Maluku Tenggara.

BPS Kabupaten Maluku Tenggara menyusun Rencana Startegis 2015-2019 yang menggambarkan upaya peningkatan kemampuan BPS Kabupaten Maluku Tenggara dalam menyediakan data statistik berkualitas, serta upaya menjalankan perannya sebagai pembina dan koordinator kegiatan statistik dalam kerangka pembangunan sistem statistik nasional secara lebih efektif. Sebagai cerminan dari upaya ini, BPS telah menetapkan visi” **Pelopor data Statistik Terpercaya Untuk Semua**” Untuk dapat mewujudkan visi tersebut BPS Kabupaten Maluku Tenggara telah merumuskan 3 misi yakni: Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi, berstandar nasional dan internasional; Memperkuat sistem statistik nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi dibidang statistik; dan Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

Melalui pernyataan visi dan misi tersebut BPS Kabupaten Maluku Tenggara memiliki wawasan untuk mencapai sejumlah tujuan strategis di tahun 2019, yaitu: Peningkatan kualitas data statistik; Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik; dan Peningkatan penyelenggaraan/pelaksanaan birokrasi yang akuntabel. Tujuan strategis ini mencerminkan fokus perubahan yang akan dilakukan oleh BPS Kabupaten Maluku Tenggara dalam periode Renstra 2015-2019. Pencapaian tujuan dan sasaran strategis tersebut selanjutnya diwadahi kedalam sejumlah program, yakni: Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS); Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL); dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA).

Pada akhirnya, seluruh penjabaran tujuan serta sasaran strategis dalam Renstra BPS Kabupaten Maluku Tenggara 2015-2019 tersebut akan menjadi pedoman bagi BPS Kabupaten Maluku Tenggara untuk mewujudkan visinya sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk semua.

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kondisi Umum	2
1.2. Potensi dan Permasalahan	3
BAB II. VISI, MISI DAN TUJUAN	6
2.1. Visi BPS Kabupaten Maluku Tenggara	6
2.2. Misi BPS Kabupaten Maluku Tenggara	7
2.3. Tujuan	8
2.4. Sasaran Strategis	10
2.5 Nilai-Nilai Inti BPS	13
BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	16
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	16
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi BPS Kabupaten Maluku Tenggara	17
3.3. Kerangka Regulasi	31
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	33
4.1. Target Kinerja	33
4.2. Kerangka Pendanaan	39
BAB V. PENUTUP	45

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1.3. Tujuan dan Indikator Tujuan BPS Kabupaten Maluku Tenggara ...	10
Tabel 2.4. Tujuan dan Strategis BPS Kabupaten Maluku Tenggara	11
Tabel 3.1. Keterkaitan Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi	18
Tabel 3.2. Program dan Kegiatan BPS Kabupaten Maluku Tenggara	22
Tabel 4.1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis	34
Tabel 4.3. Matriks Pendanaan	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

BPS Kabupaten Maluku Tenggara mempunyai tugas menyediakan data statistik yang berkualitas, lengkap dan akurat, mutakhir, berkelanjutan dan relevan, bagi pemerintah dan pengguna data lainnya. Data dan informasi statistik yang berkualitas merupakan rujukan bagi upaya perumusan kebijakan dalam menyusun perencanaan, melakukan monitoring dan mengevaluasi program-program agar sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tepat, sehingga tujuan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat dicapai dengan efektif.

Renstra BPS Kabupaten Maluku Tenggara 2015-2019 mengacu pada Renstra BPS RI yang disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan memperhatikan RPJM Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, sehingga selaras dengan Renstra Pemerintah Kabupaten dan lembaga-lembaga pemerintah lain di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Renstra sebagai acuan dalam menyusun rencana kerja tahunan agar pelaksanaan program dan kegiatan akan menjadi lebih terarah, efektif dan efisien.

Rencana Strategis (RENSTRA) BPS Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara di bidang statistik dalam kurun waktu tersebut. Oleh karena itu, diharapkan dapat menjadi acuan umum jajaran BPS Kabupaten Maluku Tenggara dan pihak terkait dalam melaksanakan pembangunan di bidang statistik selama lima tahun ke depan. Untuk lebih mudah mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra, maka program dan kegiatan yang telah dirumuskan perlu dijabarkan secara lebih rinci ke dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Rencana Strategis yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan diharapkan dapat memenuhi tuntutan kebutuhan data dan informasi statistik yang semakin meningkat, terutama yang berkaitan dengan masalah perencanaan dan evaluasi pembangunan. Hal ini merupakan tantangan yang harus dihadapi dengan terus meningkatkan kualitas penyediaan dan pelayanan yang baik. Oleh

karena itu, BPS Kabupaten Maluku Tenggara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menentukan arah pembangunan dengan menetapkan visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan sebagaimana tertuang dalam Renstra BPS Kabupaten Maluku Tenggara 2015-2019.

1.2. Kondisi Umum

Sejalan dengan penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, langkah penguatan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan menjadi pilihan strategis. Proses perencanaan memerlukan data dan informasi statistik yang berkualitas. Oleh karena itu, ketersediaan data dan informasi statistik yang andal merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan. Data dan informasi statistik berkualitas tidak saja menjadi rujukan pemerintah, tetapi juga dibutuhkan oleh kalangan swasta dan masyarakat untuk pengembangan usaha dan beragam kebutuhan lainnya.

Masyarakat menuntut ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam, rinci, mudah dipahami dan tepat waktu. Tuntutan kebutuhan data dan informasi statistik tersebut belum sepenuhnya terpenuhi, namun secara bertahap terus diupayakan ketersediaannya. Dalam lima tahun kedepan BPS Kabupaten Maluku Tenggara akan melaksanakan Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik yang ditetapkan BPS RI untuk penguatan sistem data dan informasi pembangunan yang sejalan dengan RPJM daerah, dalam rangka mendukung pencapaian keberhasilan pembangunan Nasional.

Selama ini, BPS Kabupaten Maluku Tenggara telah menghasilkan beragam data dan indikator sosial ekonomi. Indikator-sosial ekonomi diperoleh melalui sensus penduduk, sensus ekonomi dan berbagai survei di bidang sosial ekonomi dan kependudukan. Beberapa indikator tersebut telah dapat dihasilkan secara reguler maupun dalam waktu tertentu.

BPS Kabupaten Maluku Tenggara juga telah memenuhi kebutuhan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, diantaranya Pendataan Sosial Ekonomi 2005, Pendataan Program Perlindungan Sosial 2008 dan Pendataan Usaha Tani 2009 untuk mendukung program-program khusus seperti Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan sejenisnya.

1.3. Potensi dan Permasalahan

Dalam merencanakan pembangunan di bidang statistik yang akan dilaksanakan, dipandang perlu untuk memahami potensi yang dimiliki dan permasalahan yang dihadapi, agar rumusan program dan kegiatan menjadi tepat guna, tepat waktu dan tepat sasaran.

1.3.1. Potensi yang dimiliki

Secara kelembagaan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah (Pusat), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan bagian integral dari BPS Republik Indonesia secara keseluruhan. Perpres tersebut menjamin koordinasi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, terutama untuk menyediakan dan memberikan pelayanan data dan informasi statistik kepada publik.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah (pusat), pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, menempatkan BPS pada posisi strategis dalam mengembangkan Sistem Statistik Nasional, baik pusat maupun daerah. BPS menjadi badan yang bertanggungjawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar, serta menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Untuk itu, BPS mengeluarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan statistik sektoral oleh pemerintah daerah yaitu dengan menetapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK).

Kemajuan TIK yang pesat sangat potensial dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari. Ketersediaan peralatan dan perlengkapan untuk keperluan pengumpulan data, pengolahan data, maupun estimasi data berbasis TIK mutakhir yang dimiliki BPS Kabupaten Maluku Tenggara, merupakan potensi untuk meningkatkan kualitas dan mempercepat ketersediaan serta pelayanan data dan informasi statistik yang diperlukan oleh konsumen.

Dewasa ini, data dan informasi statistik secara resmi digunakan pada hampir semua level pemerintahan sebagai rujukan dalam perumusan kebijakan, perencanaan, pemantauan, maupun evaluasi pembangunan. Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) memuat sejumlah indikator kunci sebagai bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan otonom daerah, memerlukan keetersediaan data dan informasi statistik pada tingkat wilayah pemerintahan terkecil.

Sejalan dengan kondisi tersebut, meskipun secara umum kesadaran masyarakat baik sebagai responden maupun sebagai konsumen terhadap data dan informasi statistik dalam wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dirasakan masih rendah, tetapi sebagai bagian dari pelaksanaan SSN maka penyediaan data dan informasi statistik yang beragam dan berkualitas tidak dapat dihindari. Menyikapi hal ini, pemerintah dalam RPJM Nasional Tahun 2015-2019 menempatkan penguatan sistem data dan informasi statistik sebagai bagian dari sistem pendukung manajemen pembangunan nasional.

1.3.2. Permasalahan yang dihadapi

Implementasi kebijakan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004, tentang otonomi daerah beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya, membutuhkan berbagai ragam data dan informasi statistik untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi dan permasalahan yang dihadapi setiap daerah setiap daerah otonom. Akan tetapi penyediaan berbagai jenis data dan informasi statistik yang dibutuhkan belum semuanya dapat dipenuhi sesuai harapan dari kalangan yang membutuhkan.

Beberapa daerah dengan kondisi geografis yang relatif sulit terjangkau karena infrastruktur jalan yang masih sangat terbatas dan beberapa wilayah kepulauan yang masih kesulitan sarana transportasi yang belum teratasi. Hal ini berdampak pada terhambatnya berbagai aktifitas pelaksanaan lapangan kegiatan statistik, sehingga sangat berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyediaan data dan informasi statistik.

Permasalahan lainnya adalah masih terbatasnya SDM statistik yang profesional. Selama ini, STIS yang dikelola BPS atau Perguruan Tinggi lain baik negeri maupun yang mampu menghasilkan SDM statistik profesional masih didominasi oleh mereka lulusan SMA/MA dari daerah-daerah yang relatif yang sudah maju. Disisi lain, euforia otonomi daerah yang menggairahkan pemekaran wilayah lebih banyak terjadi di daerah-daerah yang SDM masih rendah. Kondisi

ini menjadi tantangan BPS dalam menyediakan SDM yang berkualitas dan kompeten untuk memenuhi kebutuhan daerah-daerah pemekaran.

Hal-hal lain yang dipandang sebagai permasalahan eksternal adalah rendahnya kesadaran responden, baik rumah tangga, perusahaan, maupun lembaga dalam memberikan informasi dengan benar. Hal ini menyebabkan data yang dihasilkan meenjadi kurang berkualitas dan *rensponse rate* yang rendah.

Selain itu, belum terpenuhinya peningkatan kebutuhan ragam data dan informasi statistik wilayah kecil, termasuk data mikro. Salah satu kendala adalah Undang-undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik yang tidak memperkenalkan BPS menyajikan data individu. Sementara itu, sosialisasi UU tersebut belum mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang tugas dan fungsi BPS, sehingga mereka beranggapan bahwa BPS sember dari segala jenis data dan informasi statistik yang mereka perlukan.

Koordinasi antar instansi belum optimal, sehingga masih sering terjadi duplikasi penyelenggaraan kegiatan statistik yang mengakibatkan penggunaan anggaran yang kurang efisien.

Permasalahan penting lainnya yaitu belum optimalnya implementasi empat prinsip dasar dari sepuluh prinsip dasar penyelenggaraan statistik resmi yang direkomendasikan oleh PBB, antara lain:

- i. *National Statistical Offices* (NSO) berhak untuk membetulkan dan mengklarifikasi apabila terjadi kekeliruan tafsir dan penyalahgunaan statistik.
- ii. Informasi statistik diperoleh dari berbagai sumber baik melalui sensus, survei maupun catatan administrasi dimana NSO bertanggungjawab terhadap kualitas, ketepatan waktu, biaya dan beban pada responden.
- iii. Koordinasi diantara penyelenggaraan statistik dan NSO adalah penting untuk mencapai sistem statistik yang konsisten dan efisien.
- iv. Kerjasama bilateral dan multilateral dalam bidang statistik dianjurkan dalam kerangka perbaikan sistem statistik nasional di semua negara.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

Sebagai instansi vertikal, BPS Kabupaten Maluku Tenggara merupakan salah satu perwakilan BPS RI di daerah. Oleh karena itu, obsesi dan cita-cita ideal masa depan yang akan dicapai oleh BPS RI sebagaimana dirumuskan melalui visi, misi dan tujuan menjadi acuan bagi perwakilan BPS di daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai bagian dari BPS RI.

2.1. Visi BPS Kabupaten Maluku Tenggara

Gambaran cita-cita ideal masa depan BPS tercermin dari visi yang telah disepakati, dibangun dengan memperhatikan berbagai kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan tantangan yang dihadapi dari pihak luar dengan landasan pemikiran proaktif. Berkaitan dengan hal itu, maka pembangunan bidang statistik diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang, seperti reformasi yang mendukung keterbukaan informasi, otonomi daerah yang mengandung tantangan keragaman data dan informasi statistik pada tingkatan wilayah kecil, perkembangan teknologi informasi yang mengarah kepada peningkatan kemudahan akses masyarakat akan data dan informasi, serta memperhatikan kesiapan SDM penyelenggara statistik. Mempertimbangkan berbagai hal tersebut dan sebagai bagian dari BPS RI maka visi BPS Kabupaten Maluku Tenggara 2015-2019 sama dengan visi BPS RI:

“ Pelopor data statistik terpercaya untuk semua”

“the Agent of trustworthy statistical data for all”

Kata **Pelopor** mempunyai makna bahwa BPS sebagai pencetus ide penyedia statistik terpercaya sekaligus sebagai pelaku dalam penyediaan statistik terpercaya. Kata **Data Statistik Terpercaya** yaitu statistik yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Kata **Untuk Semua** dimaksudkan bahwa semua pihak mempunyai hak sama untuk mengakses data BPS Kabupaten Maluku Tenggara baik pengguna data daerah, nasional maupun internasional

Dengan visi tersebut eksistensi BPS Kabupaten Maluku Tenggara sebagai pelopor data statistik di wilayahnya menjadi semakin penting. Oleh karena itu,

dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diembannya BPS akan terus berupaya agar data dan informasi yang dihasilkan benar-benar melalui proses berdasarkan metodologi statistik yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat dipercaya oleh semua pihak. Penjabaran visi tersebut, memberikan kesempatan luas kepada masyarakat dan berbagai pihak untuk berperan serta dalam menyediakan data statistik. Hal ini menunjukkan bahwa BPS Kabupaten Maluku Tenggara bukan hanya bagian dari pemerintah daerah, tapi juga bagian dari keseluruhan aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual.

Dengan demikian, proses penyediaan data dan informasi statistik yang dihasilkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat, dan disebarluaskan melalui berbagai media dengan berbagai cara agar semua pihak dapat dengan memanfaatkannya

2.2. Misi BPS Kabupaten Maluku Tenggara

Dalam rangka mewujudkan visi, maka disusun misi yang harus dijalankan sebagai penjabaran dari visi serta rencana pelaksanaan program dan kegiatan agar mampu mencapai visi yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan visi tersebut, sebagai bagian dari BPS RI maka misi BPS Kabupaten Maluku Tenggara 2015-2019 sama dengan misi BPS RI dalam melaksanakan pembangunan statistik di daerahnya mencakup:

1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional;
2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik;
3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegrasi dan amanah untuk kemajuan perstatistikan;

Misi BPS Kabupaten Maluku Tenggara mengandung arti:

1. BPS Kabupaten Maluku Tenggara merupakan penyelenggara statistik dasar di daerah yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas baik bagi pemerintah maupun masyarakat (Perpres No.86 Tahun 2007) dan data statistik yang dihasilkan memenuhi dimensi kualitas yakni relevan,

akurat, disajikan tepat waktu, koheren, dapat diakses, dan dapat diinterpretasikan. Setiap penyelenggaraan kegiatan statistik selalu berpedoman kepada konsep, standar dan metode yang berlaku secara universal dan berstandar internasional, mengikuti kaidah yang digariskan dalam *Fundamental Principle Of Official Statistics*.

2. Sistem statistik nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik. Sistem statistik nasional perlu diwujudkan secara terus menerus dan berkelanjutan. (UU No.16 tahun 1997). Dalam melakukan pembinaan statistik BPS Kabupaten Maluku Tenggara dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swasta, dan atau unsur masyarakat lainnya.
3. Pembangunan insan statistik dilakukan untuk mewujudkan pengejawantahan nilai-nilai organisasi BPS, yakni profesional, berintegritas dan amanah. Dalam hal ini penyelenggaraan kegiatan statistik, insan statistik yang harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas, insan statistik juga harus memiliki integritas yaitu sikap dan perilaku dalam melaksanakan profesi/tugas seperti dedikasi, disiplin, konsisten, terbuka, dan akuntabel dan yang terakhir insan statistik harus beramanah yaitu sikap yang selalu mengedepankan kejujuran di dalam melaksanakan kegiatan statistik.

2.3. Tujuan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamanatkan BPS untuk menyediakan data dan informasi statistik pada skala nasional maupun regional, serta melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi penyelenggaraan statistik. Dengan dasar itu, tujuan utama pembangunan statistik di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual lima tahun ke depan meliputi tiga hal:

1. Peningkatan kualitas data statistik;
2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik;
3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel;

Adapun tujuan BPS Kabupaten Maluku Tenggara dalam rangka mencapai visi BPS Kabupaten Maluku Tenggara dan mewujudkan Misi BPS Kabupaten Maluku Tenggara kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan 1 : Peningkatan kualitas data statistik terkait dengan
 - 1.1 Misi ke-1 : menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional
 - 1.2 Misi ke-3 : Membangun insan statistik yang profesional berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan
2. Tujuan 2 : Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik terkait dengan
 - 2.1. Misi ke-2 : Memperkuat sistem statistik nasional berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik
 - 2.2. Misi ke-3 : Membangun insan statistik yang profesional berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan
3. Tujuan 3 : Peningkatan birokrasi yang akuntabel terkait dengan
 - 3.1 Misi ke-3 : Membangun insan statistik yang profesional berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan

Tujuan pertama pembangunan statistik menuntut BPS Kabupaten Maluku Tenggara untuk meningkatkan kualitas data statistik. Tujuan pertama ini akan didukung dan diupayakan dengan menerapkan program Statcap Cerdas.

Tujuan kedua berupa peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik. Keberhasilan upaya peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik tidak terlepas dari dukungan dan peranan TIK, yang diwujudkan melalui pembangunan arsitektur dan kerangka TIK dan manajemen informasi. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya pengguna TIK statistik. Tujuan kedua ini akan diperkuat oleh komponen kedua statcap Cerdas yaitu penguatan teknologi informasi dan komunikasi serta sistem informasi manajemen statistik.

Tujuan ketiga peningkatan birokrasi yang akuntabel, didalam tujuan tersebut terkait dengan misi membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. Untuk itu, peningkatan kapasitas dan

kemampuan tenaga statistik di Kabupaten Maluku Tenggara harus terus dilakukan.

Dalam rangka mengantisipasi lingkungan strategis yang berkembang, BPS Kabupaten Maluku Tenggara berperan aktif dalam pembangunan statistik yang dilakukan melalui reformasi birokrasi dengan menerapkan program Statcap CERDAS (*Statistical Capacity Building – Change and Reform for Development of Statistics in Indonesia*). Empat pilar reformasi birokrasi dilakukan BPS RI dalam tempo 2010-2014, meliputi: (i). Peningkatan kualitas data; (ii). Pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia; (iii). Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta sarana kerja; dan (iv). Penguatan kelembagaan dan hubungan dengan sumber data dan pengguna data.

Tabel 1.3 Tujuan dan Indikator Tujuan BPS Kabupaten Maluku Tenggara 2015-2019

No.	Tujuan		Target				
	Uraian	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Peningkatan Kualitas Data Statistik	Persentase Konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	80%	80%	80%	80%	80%
2.	Peningkatan Pelayanan Prima hasil kegiatan statistik	Persentase Kepuasan Konsumen terhadap Pelayanan Data BPS	90%	90%	90%	90%	90%
3.	Peningkatan Birokrasi yang Akuntabel	Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat	0%	56%	58%	60%	62%

2.4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPS Kabupaten Maluku Tenggara yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*Outcome*) dari satu atau beberapa program BPS Kabupaten Maluku Tenggara. Adapun tujuan dan sasaran strategis teknis BPS Kabupaten Maluku Tenggara dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4 Tujuan dan Sasaran Strategis BPS Kabupaten Maluku Tenggara

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS TEKNIS
T1. Peningkatan Kualitas Data Statistik	SS1. Meningkatnya Kepercayaan Pengguna terhadap Kualitas Data BPS
	SS2. Meningkatnya Kualitas Hubungan dengan Sumber Data
T2. Peningkatan Pelayanan Prima hasil kegiatan Statistik	SS1. Meningkatnya Kualitas Hubungan dengan Pengguna Data
T3. Peningkatan Birokrasi yang Akuntabel	SS1. Meningkatnya Kualitas Manajemen Sumber Daya Manusia BPS
	SS2. Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS

Secara ringkas rumusan indikator pada sasaran strategis pembangunan statistik daerah dalam rangka mencapai Visi BPS Kabupaten Maluku Tenggara dan Mewujudkan Misi BPS Kabupaten Maluku Tenggara untuk kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran strategis dari tujuan pertama: “Peningkatan Kualitas Data” adalah:

1.1 Meningkatnya Kepercayaan Pengguna terhadap Kualitas data BPS

Dengan indikator sasaran :

- 1.1.1 Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik
- 1.1.2 Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama
- 1.1.3 Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS
- 1.1.4 Jumlah rilis data yang tepat waktu
- 1.1.5 Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu

1.2.Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data dengan indikator sasaran:

1.2.1 Persentase pemasukan dokumen survei dengan pendekatan rumah tangga

1.2.2 Persentase pemasukan dokumen survei dengan pendekatan usaha

1.2.3 Persentase pemasukan dokumen survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha

2. Sasaran strategis dari tujuan kedua: “Peningkatan Pelayanan Prima hasil kegiatan Statistik” adalah:

2.1.Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data dengan indikator sasaran:

2.1.1 Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui websites BPS

2.1.2 Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS

2.1.3 Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS

3. Sasaran strategis dari tujuan ketiga: “Peningkatan Birokrasi yang Akuntabel” adalah:

3.1.Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS dengan indikator sasaran:

3.1.1 Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu

3.1.2 Persentase pegawai yang berpendidikan minimal diploma IV atau Strata 1

3.2.Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS dengan indikator sasaran:

3.2.1 Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat

2.5. Nilai-Nilai Inti BPS

Nilai inti merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh setiap pegawai dan yang memandu pegawai dalam memilih berbagai alternatif yang diperlukan untuk menuju masa depan. BPS telah menetapkan nilai-nilai inti yang dapat dijadikan sebagai pedoman oleh setiap pegawainya dalam menetapkan keputusan berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi BPS Kabupaten Maluku Tenggara.

Nilai-nilai inti (*Core Values*) Badan Pusat Statistik adalah:

1. **Profesional** (Kompeten, Efektif, Efisien, Inovatif dan Sistemik)
2. **Integritas** (Dedikasi, Disiplin, Konsisten, Terbuka dan Akuntabel)
3. **Amanah** (Terpercaya, Jujur, Tulus, dan adil).

Nilai-nilai inti BPS ini merupakan pondasi yang kokoh untuk membangun jati diri dari penuntun perilaku setiap insan BPS dalam melaksanakan tugas. Adapaun penjabaran dari nilai-nilai inti BPS ini adalah sebagai berikut:

1. Profesional

Profesional merupakan modal dasar yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam melaksanakan profesi/tugasnya, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

a. Kompeten

Mempunyai keahlian dalam bidang tugas yang diemban

b. Efektif

Memberikan hasil maksimal

c. Efisien

Mengerjakan setiap tugas secara produktif, dengan sumber daya minimal

d. Inovatif

Selalu melakukan pembaruan dan atau penyempurnaan melalui proses pembelajaran diri secara terus menerus

e. Sistematis

Meyakini bahwa setiap pekerjaan mempunyai tata urutan proses sehingga pekerjaan yang satu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan yang lain.

2. Integritas

Integritas merupakan sikap dan perilaku kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam pengabdian kepada organisasi, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

a. Dedikasi

Memiliki pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban dan institusi

b. Disiplin

Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

c. Konsisten

Selarasnya kata dengan perbuatan

d. Terbuka

Menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik dari berbagai pihak

e. Akuntabel

Bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur.

3. Amanah

Amanah merupakan sikap kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai untuk dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

a. Terpercaya

Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, yang tidak hanya didasarkan pada logika tetapi juga sekaligus menyentuh dimensi mental spiritual

b. Jujur

Melaksanakan semua pekerjaan dengan tidak menyimpang dari prinsip moralitas

c. Tulus

Melaksanakan tugas tanpa pamrih, menghindari konflik kepentingan (pribadi, kelompok dan golongan), serta mendedikasikan semua tugas untuk perlindungan kehidupan manusia, sebagai amal ibadah atau perbuatan untuk Tuhan Yang Maha Esa

d. Adil

Menempatkan sesuatu secara berkeadilan dan memberikan haknya.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Prioritas pembangunan jangka menengah di bidang data dan informasi statistik adalah peningkatan kualitas statistik nasional. Kualitas data diukur dalam enam dimensi, yaitu akurat, relevan, tepat waktu/*timeliness*, mudah diakses/*accessibility*, koheren/*coherence* yang berarti konsisten antarsektor dan antarperiode dan spasial, serta mudah diinterpretasi/*interpretability*.

Statistik bermutu tinggi dan dapat diandalkan yang dihasilkan secara tepat waktu merupakan bagian esensial dalam proses perumusan suatu kebijakan. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya kualitas data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat, meningkatnya kualitas data dan informasi statistik kesejahteraan rakyat, meningkatnya manajemen survei, meningkatnya metodologi survei, meningkatnya dan berkembangnya analisis statistik, meningkatnya hubungan dengan pengguna data meningkatnya efektivitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik, serta meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Peningkatan kualitas data dan informasi statistik selama ini baru terfokus kepada perbaikan metodologi dan teknis statistik.

Saat ini perbaikan yang dilakukan diharapkan mulai menyentuh seluruh aspek seperti penelaahan kembali proses ketatalaksanaan (*business process review*), pengembangan kapasitas TIK, dan peningkatan kapasitas dan kemampuan SDM serta penataan kelembagaan. Keberhasilan upaya peningkatan kualitas data dan informasi statistik ini tidak terlepas dari dukungan dan peranan TIK, yang diwujudkan melalui pembangunan arsitektur dan kerangka TIK dan manajemen informasi. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya penggunaan TIK statistik. Keberhasilan peningkatan kualitas data dan informasi statistik juga sangat memerlukan dukungan dan peranan dari SDM. Hal ini menunjukkan meningkatnya kapasitas dan kemampuan tenaga statistik di pusat maupun daerah.

Pembangunan kapasitas dan penyediaan data dan informasi statistik nasional direncanakan akan dilakukan melalui sebuah program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik. Program ini akan menjadi sebuah rencana kerja institusi penyedia data dan informasi statistik, di pusat maupun di daerah.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BPS Kabupaten Maluku Tenggara

Data statistik yang berkualitas sangat diperlukan oleh semua pihak sebagai bahan rujukan untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat keputusan, dan memformulasikan kebijakan agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Data statistik seringkali juga dimanfaatkan sebagai alat konfirmasi dan legitimasi terhadap penilaian program pembangunan pemerintah daerah.

Tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam dan berkualitas semakin hari semakin meningkat. Pengguna data senantiasa menginginkan ketersediaan data dengan lebih cepat, lebih mudah diperoleh, dan lebih berkualitas. Upaya pengembangan yang dilakukan sampai saat ini telah menghasilkan beragam data dan indikator-indikator sosial ekonomi. Meskipun demikian, data yang dihasilkan tidak jarang mendapatkan kritik karena dinilai tidak mencerminkan realitas di lapangan. Pro dan kontra mengenai data yang dihasilkan mengindikasikan bahwa kualitas data yang tersedia masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta mengacu pada rancangan awal RPJMD 2015-2019, maka BPS Kabupaten Maluku Tenggara menetapkan kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategisnya.

Tabel. 3.1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi

Tujuan	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
1. Peningkatan kualitas data statistik	1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS	1. Peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan publikasi survei yang mencantumkan ukuran kualitas 2. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk pengumpulan serta pengolahan data dan informasi statistik 3. Meningkatkan kualitas metodologi survei dan sensus sesuai standar internasional
	2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data	1. Peningkatan <i>response rate</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan komunikasi dengan penyedia data 2. Meningkatkan sosialisasi kegiatan BPS
2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	3. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data	1. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyebaran data dan informasi statistik kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan deseminasi hasil kegiatan statistik 2. Meningkatkan <i>Customer Relationship Management</i> 3. Meningkatkan sosialisasi kegiatan statistik
		2. Peningkatan kemudahan dan kecepatan akses terhadap data dan informasi statistik BPS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas website BPS dan atau PST didukung oleh TIK dan infrastruktur yang memadai 2. Mengoptimalkan sistem informasi statistik dalam mendukung kualitas diseminasi data informasi statistik
		3. Pemenuhan sarana dan prasarana BPS secara akuntabel dalam mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan efektivitas pemenuhan sarana dan prasarana BPS yang mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik 2. Meningkatkan tingkat utilisasi penggunaan sarana dan prasarana BPS dalam rangka meningkatkan pelayanan prima hasil kegiatan statistik

Tujuan	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel	1. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS	<ol style="list-style-type: none"> Penguatan fungsi yang terkait dengan sistem manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja Penyelarasan kegiatan yang terkait dengan reformasi birokrasi BPS Khususnya yang terkait dengan sistem manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja 	<ol style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan pembangunan keseluruhan sistem manajemen SDM aparatur yang terintegrasi dan komprehensif Mengoptimalkan pengembangan kompetensi SDM aparatur termasuk meningkatkan kompetensi SDM dalam bidang teknis statistik dan TI, pemenuhan sarana dan prasarana BPS yang mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik. Mengoptimalkan penyiapan kebutuhan insan statistik (tenaga statistisi dan pranata komputer) yang baru
	2. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS		<ol style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan pengawasan penggunaan anggaran dalam rangka meminimalkan penyimpangan penggunaan anggaran Meningkatkan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

3.2.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Statistik

Arah kebijakan pembangunan daerah (RPJMD 2015-2019) yang terkait dengan pembangunan statistik, merupakan dasar pertimbangan BPS Kabupaten Maluku Tenggara dalam menetapkan pembangunan kerangka pikir dan arah kebijakan pembangunan statistik tahun 2015-2019.

Keinginan masyarakat terhadap data berkualitas, mengisyaratkan bahwa pemerintah harus mampu menyajikan data dan informasi statistik yang dapat dipercaya, relevan dan tepat waktu melalui proses kerja yang sistematis tanpa ada distorsi melalui penataan organisasi serta tata laksana penyediaan data dan informasi, dan didukung sumber daya manusia (SDM) yang profesional, serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang modern. Untuk meningkatkan tata laksana penyediaan data dan informasi, dibutuhkan upaya yang luar biasa agar dapat mencapai kinerja yang optimal. Peningkatan tersebut bukan berarti bahwa pembangunan statistik hanya difokuskan pada peningkatan teknik statistik semata, namun perbaikan proses manajemen untuk menghasilkan data tersebut juga harus menjadi perhatian.

3.2.2. Program dan Kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan statistik, penyusunan program dan kegiatan dalam renstra BPS Kabupaten Maluku Tenggara 2015-2019 mengacu pada sasaran strategis yang telah ditetapkan. BPS Provinsi Maluku mempunyai satu program Teknis dan dua Program Generik. Program Teknis BPS Kabupaten Maluku Tenggara adalah Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik. Adapun Program Generik BPS Kabupaten Maluku Tenggara meliputi (i) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, (ii) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS.

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik bertujuan untuk menyediakan dan memberikan pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. Untuk menyediakan data dan informasi statistik tersebut, BPS Kabupaten Maluku Tenggara secara berkesinambungan menyempurnakan dan mengembangkan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta deseminasi data dan informasi statistik.

Kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam program PPIS dapat dilaksanakan secara optimal jika didukung oleh 2 (dua) program generik yaitu: Program DMPTTL, dan Program PSPA. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Dasar kebijakan dalam rencana anggaran program ini diarahkan untuk kegiatan-kegiatan operasional penyelenggaraan lembaga seperti perencanaan program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan, penyediaan gaji pegawai, dan peningkatan SDM. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS Kabupaten Maluku Tenggara, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan sarana transportasi untuk kabupaten.

Prioritas kegiatan BPS Kabupaten Maluku Tenggara dilaksanakan dengan didasarkan kepada:

- a. UU No.16 Tahun 1997 tentang Statistik
- b. Penyediaan data strategis yang mendukung Visi dan Misi RPJM Daerah Penyelenggaraan Sensus Pertanian 2013, Sensus Ekonomi 2016, dan Sensus Penduduk 2020 yang telah ditetapkan sebagai isu strategis. Sedangkan kegiatan survei BPS lainnya tetap merupakan prioritas Kementrian/Lembaga.

Tabel 3.2 Program dan Kegiatan BPS Kabupaten Maluku Tenggara

Tujuan	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
1. Peningkatan kualitas data statistik	1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS	1. Peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas	1. Meningkatkan publikasi survei yang mencamtumkan ukuran kualitas 2. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk pengumpulan serta pengolahan data dan informasi statistik 3. Meningkatkan kualitas metodologi survei dan sensus sesuai standar internasional	Program PPIS	1. Indeks tendensi bisnis dan indeks tendensi konsumen 2. Penyusunan Statistik Daerah 3. Peningkatan pelayanan metadata kegiatan statistik dasar sektoral dan khusus 4. Penyusunan komponen pengeluaran triwulanan dan tahunan 5. Penyusunan neraca rumah tangga dan institusi nirlaba 6. Konsolidasi PDRB triwulanan dan tahunan menurut pengeluaran 7. Penyusunan PDRB tahunan dan triwulanan menurut lapangan lapangan usaha tahun dasar 2010 8. Updating peta desa dan blok sensus

Tujuan	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
					9. Kompilasi data statistik ekspor 10. Kompilasi data transportasi 11. Pengadaan data IKK 2015 dalam rangka kebijakan dana perimbangan 2016 12. Survei harga konsumen dan survei volume penjualan eceran beras 13. Survei harga pedesaan 14. Survei konstruksi 15. Survei angkatan kerja nasional (sakernas) semesteran 16. Survei angkatan kerja nasional (sakernas) tahunan 17. Survei struktur upah 18. Survei upah 19. Survei sosial ekonomi nasional kor dan konsumsi tahun 2015 20. Susenas panel 2015 21. Survei sosial ekonomi nasional konsumsi dan MSBP tahun 2015

Tujuan	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
					22. Survei statistik politik dan keamanan 23. Survei statistik badan usaha dan pasar modal 24. Survei statistik keuangan pemerintah daerah 25. Survei bidang jasa pariwisata 26. Survei perusahaan peternakan dan RPH/TPH 27. Survei perusahaan perikanan, TPI/PPI/PP 28. Survei perusahaan kehutanan 29. Survei pertanian tanaman pangan dan ubinan 30. Survei hortikultura dan indikator pertanian 31. Pelaksanaan supas 2015 32. Pengolahan supas 2015 33. Penggambaran peta BS bermuatan kegiatan ekonomi 34. Pembentukan master frame blok sensus SE2016

Tujuan	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
					35. Persiapan publisitas SE2016 36. Updating direktori usaha/perusahaan tahap II 37. Pemutakhiran basis data terpadu 2015
	2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data	1. Peningkatan respon rate	1. Meningkatkan komunikasi dengan penyedia data 2. Meningkatkan sosialisasi kegiatan BPS 3. Meningkatkan kualitas metodologi survei dan sensus sesuai standar internasional	Program PPIS	1. Indeks tendensi bisnis dan indeks tendensi konsumen 2. Penyusunan Statistik Daerah 3. Peningkatan pelayanan metadata kegiatan statistik dasar sektoral dan khusus 4. Penyusunan pengeluaran triwulanan dan tahunan 5. Penyusunan neraca rumah tangga dan institusi nirlaba 6. Konsolidasi PDRB triwulanan dan tahunan menurut pengeluaran 7. Penyusunan PDRB tahunan dan triwulanan menurut lapangan usaha tahun dasar 2010

Tujuan	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
					<ul style="list-style-type: none"> 8. Updating peta desa dan blok sensus 9. Kompilasi data statistik ekspor 10. Kompilasi data transportasi 11. Pengadaan data IKK 2015 dalam rangka kebijakan dana perimbangan 2016 12. Survei harga konsumen dan survei volume penjualan eceran beras 13. Survei harga pedesaan 14. Survei konstruksi 15. Survei angkatan kerja nasional (sakernas) semesteran 16. Survei angkatan kerja nasional (sakernas) tahunan 17. Survei struktur upah 18. Survei upah 19. Survei sosial ekonomi nasional kor dan konsumsi tahun 2015 20. Susenas panel 2015

Tujuan	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
					21. Survei sosial ekonomi nasional konsumsi dan MSBP tahun 2015 22. Survei statistik politik dan keamanan 23. Survei statistik badan usaha dan pasar modal 24. Survei statistik keuangan pemerintah daerah 25. Survei bidang jasa pariwisata 26. Survei perusahaan peternakan dan RPH/TPH 27. Survei perusahaan perikanan, TPI/PPI/PP 28. Survei perusahaan kehutanan 29. Survei pertanian tanaman pangan dan ubinan 30. Survei hortikultura dan indikator pertanian 31. Pelaksanaan supas 2015 32. Pengolahan supas 2015 33. Penggambaran peta BS bermuatan kegiatan ekonomi

Tujuan	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
					34. Pembentukan master frame blok sensus SE2016 35. Persiapan publisitas SE2016 36. Updating direktori usaha/perusahaan tahap II 37. Pemutakhiran basis data terpadu 2015
2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	1. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data	1. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyebaran data dan informasi statistik kepada masyarakat	1. Meningkatkan deseminasi hasil kegiatan statistik 2. Meningkatkan <i>Customer Relationship Management</i> 3. Meningkatkan sosialisasi kegiatan statistik	PPIS	1. Persiapan publisitas SE2016
		2. Peningkatan kemudahan dan kecepatan akses terhadap data	1. Meningkatkan kualitas website BPS dan atau PST didukung oleh TIK dan infrastruktur yang	PPIS	1. Persiapan publisitas SE2016

Tujuan	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
		dan informasi statistik BPS	memadai 2. Mengoptimalkan sistem informasi statistik dalam mendukung kualitas diseminasi data informasi statistik		
3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel	1. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS	1. Penguatan fungsi yang terkait dengan sistem manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja 2. Penyelarasan kegiatan yang terkait dengan reformasi birokrasi BPS Khususnya yang terkait dengan sistem manajemen SDM aparatur,	1. Mengoptimalkan pembangunan keseluruhan sistem manajemen SDM aparatur yang terintegrasi dan komprehensif 2. Mengoptimalkan pengembangan kompetensi SDM aparatur termasuk meningkatkan kompetensi SDM dalam bidang teknis statistik dan TI,	Program DMPTTL	1. Pengelolaan dan pengembangan administrasi kepegawaian 2. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara

Tujuan	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
		pengawasan, akuntabilitas kinerja	pemenuhan sarana dan prasarana BPS yang mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik		
	3. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	<p>1. Penguatan fungsi yang terkait dengan sistem manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja</p> <p>2. Penyelarasan kegiatan yang terkait dengan reformasi birokrasi BPS Khususnya yang terkait dengan sistem manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja</p>	<p>1. Mengoptimalkan pengawasan penggunaan anggaran dalam rangka meminimalkan penyimpangan penggunaan anggaran</p> <p>2. Meningkatkan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS</p>	Program DMPTTL	<p>1. Peningkatan akuntabilitas di BPS Kabupaten /Kota</p> <p>2. Pengawasan Keuangan dari BPS Provinsi ke Kabupaten/Kota</p>

3.3. Kerangka Regulasi

Secara umum regulasi yang mengatur BPS Kabupaten Maluku Tenggara dapat dibagi kedalam dua kelompok yaitu regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan statistik dan regulasi mengenai struktur organisasi BPS Kabupaten Maluku Tenggara. Regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan statistik dan menjadi payung hukum bagi BPS dalam melaksanakan kegiatan statistik adalah Undang-Undang nomor 16 tahun 1997 tentang statistik dan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 1999 tentang penyelenggaraan statistik. Adapun regulasi mengenai struktur organisasi BPS utamanya adalah untuk mendukung penyelenggaraan statistik sebagai amanah UU.

BPS Kabupaten Maluku Tenggara mempunyai peran sentral di Kabupaten Maluku Tenggara untuk menghasilkan data statistik berkualitas yang digunakan sebagai acuan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Penyajian data statistik yang dapat dipercaya sangat bergantung pada kualitas data hasil survei maupun sensus. Pada proses penyelenggaraan statistik seringkali ditemui sejumlah kendala dalam upaya pengumpulan data karena regulasi yang kurang kuat. Sebagai suatu lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK), BPS Kabupaten Maluku Tenggara harus mematuhi sejumlah regulasi yang berlaku. Regulasi yang mengatur BPS dapat dibagi kedalam dua kelompok:

1. Regulasi mengenai struktur organisasi BPS
 - a. Keputusan Presiden Nomor103 tahun 2001 (yang diamandemen dengan peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2005) Tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen. Sebagai suatu LPNK, maka BPS dipimpin oleh seorang kepala yang dibantu oleh sekretaris utama, para deputy dan inspektorat utama

- b. Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik
 - c. Peraturan Kepala BPS Nomor 7 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja BPS
 - d. Peraturan Kepala BPS Nomor 121 tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja perwakilan BPS di daerah
 - e. Keputusan Kepala BPS Nomor 3 tahun 2002 tentang tugas bagian, bidang, subbagian, dan seksi perwakilan BPS di daerah
 - f. Peraturan Kepala BPS Nomor 101 tahun 1998 tentang organisasi dan tata kerja sekolah tinggi ilmu statistik
 - g. Peraturan Kepala BPS Nomor 2 tahun 2002 tentang tata kerja STIS
2. Regulasi mengenai bagaimana BPS menyelenggarakan kegiatan statistik. Berikut adalah regulasi yang menjadi payung hukum bagi BPS dan instansi pemerintah lainnya di dalam menyelenggarakan kegiatan statistik.
- a. UU Nomor 6 tahun 1997 tentang statistik
 - b. PP Nomor 51 tahun 1999 tentang penyelenggaraan statistik
 - c. Peraturan Kepala BPS Nomor 9 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis K/L 2015-2019 bahwa target kinerja merupakan hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator. Tolak ukur keberhasilan pelaksanaan Renstra BPS Kabupaten Maluku Tenggara 2015-2019 diukur dengan berbagai indikator kinerja beserta target kinerjanya. Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan.

4.1.1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indikator sasaran Strategis BPS Kabupaten Maluku Tenggara untuk Pembangunan Jangka Menengah periode 2015-2019 merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis BPS Kabupaten Maluku Tenggara dalam kurun waktu tersebut. Adapun Indikator sasaran Strategis BPS 2015-2019 disertai target kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel. 4.1 Indikator Kinerja sasaran strategis

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET KINERJA (2019)
1. Peningkatan kualitas data statistik	1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS	1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	80%
		2. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	80%
		3. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	100%
		4. Persentase release data yang tepat waktu	12
		5. Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu	55
	2. Meningkatnya kualitas hubungan sumber data	1. Persentase pemasukan dokumen dengan pendekatan rumah tangga	99,71%
		2. Persentase pemasukan dokumen survei dengan pendekatan usaha	99,17%
		3. Persentase pemasukan dokumen survei dengan pendekatan non rumah tangga dan non usaha	100%

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET KINERJA (2019)
2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	1. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data	1. Persentase konsumen yang puas akan layanan data BPS	90%
	2. Meningkatnya kualitas hubungan sumber data	1. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website	100
		2. Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS	90%
		3. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	100%

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET KINERJA (2019)
3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel	1. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS	1. Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu	100%
	2. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas aparatur BPS dan kinerja	1. Jumlah laporan dukungan manajemen	8
		2. Persentase rekomendasi inspektorat yang telah ditindaklanjuti	100%
		3. Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat	62
		4. Persentase pembayaran upah dan gaji yang tepat waktu	100%
		5. Presentase sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi dalam kondisi baik	90%
		6. Presentase sarana prasarana lainnya dalam kondisi baik	100%

4.1.2. Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka dalam kurun waktu 2015-2019, BPS Kabupaten Maluku Tenggara akan menjalankan 1 (satu) program teknis dan 2 (dua) program generik. Adapun ketiga program yang akan dijalankan oleh BPS Kabupaten Maluku Tenggara dalam kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) dengan kegiatan
 - a. Indeks tendensi bisnis dan indeks tendensi konsumen
 - b. Penyusunan Statistik Daerah
 - c. Peningkatan pelayanan metadata kegiatan statistik dasar sektoral dan khusus
 - d. Penyusunan komponen pengeluaran triwulanan dan tahunan
 - e. Penyusunan neraca rumah tangga dan institusi nirlaba
 - f. Konsolidasi PDRB triwulanan dan tahunan menurut pengeluaran
 - g. Penyusunan PDRB tahunan dan triwulanan menurut lapangan lapangan usaha tahun dasar 2010
 - h. Updating peta desa dan blok sensus
 - i. Kompilasi data statistik ekspor
 - j. Kompilasi data transportasi
 - k. Pengadaan data IKK 2015 dalam rangka kebijakan dana perimbangan 2016
 - l. Survei harga konsumen dan survei volume penjualan eceran beras
 - m. Survei harga pedesaan
 - n. Survei konstruksi
 - o. Survei angkatan kerja nasional (sakernas) semesteran
 - p. Survei angkatan kerja nasional (sakernas) tahunan
 - q. Survei struktur upah

- r. Survei upah
 - s. Survei sosial ekonomi nasional kor dan konsumsi tahun 2015
 - t. Susenas panel tahun 2015
 - u. Survei sosial ekonomi nasional konsumsi dan msbp tahun 2015
 - v. Penyusunan statistik politik dan keamanan
 - w. Survei statistik badan usaha dan pasar modal
 - x. Survei statistik keuangan pemerintah daerah
 - y. Survei bidang jasa pariwisata
 - z. Survei perusahaan peternakan dan RPH/TPH
 - aa. Survei perusahaan perikanan, TPI/PPI/PP
 - bb. Survei perusahaan kehutanan
 - cc. Survei pertanian tanaman pangan dan ubinan
 - dd. Survei hortikultura dan indikator pertanian
 - ee. Pelaksanaan supas 2015
 - ff. Pengolahan supas 2015
 - gg. Penggambaran peta BS bermuatan kegiatan ekonomi
 - hh. Pembentukan master frame SE2016
 - ii. Persiapan publisitas SE2016
 - jj. Updating direktori usaha/perusahaan tahap II
 - kk. Pemutakhiran basis data terpadu 2015
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL), dengan kegiatan:
- a. Pembayaran gaji dan tunjangan
 - b. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA), dengan kegiatan:
 - a. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara BPS

4.2. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasaran strategis BPS Kabupaten Maluku Tenggara. Adapun kerangka pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan BPS Kabupaten Maluku Tenggara adalah sebagai berikut:

Tabel. 4.3 Matriks Pendanaan

Program	Kegiatan	Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi statistik (PPIS)	1. Indeks tendensi bisnis dan indeks tendensi konsumen	6,110	6,293	6,608	7,071	7,707
	2. Penyusunan Statistik Daerah	95,975	98,854	103,797	111,063	121,058
	3. Peningkatan pelayanan metadata kegiatan statistik dasar sektoral dan khusus	42,867	44,153	46,361	49,606	54,070
	4. Penyusunan komponen pengeluaran triwulanan dan tahunan	11,940	12,298	12,913	13,817	15,061
	5. Penyusunan neraca rumah tangga dan institusi nirlaba	1,800	1,854	1,947	2,083	2,270
	6. Konsolidasi PDRB triwulanan dan tahunan menurut pengeluaran	10,017	10,318	10,833	11,592	12,635
	7. Penyusunan PDRB tahunan dan triwulanan menurut lapangan	32,255	34,253	35,965	38,483	41,946

Program	Kegiatan	Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019
	usaha tahun dasar 2010					
	8. Updating peta desa dan blok sensus	0,522	0,538	0,565	0,604	0,658
	9. Kompilasi data statistik ekspor	15,247	15,704	16,490	17,644	19,232
	10. Kompilasi data transportasi	37,088	38,201	40,111	42,918	46,781
	11. Pengadaan data IKK 2015 dalam rangka kebijakan dana perimbangan 2016	3,720	3,832	4,023	4,305	4,692
	12. Survei harga konsumen dan survei volume penjualan eceran beras	139,857	144,053	151,255	161,843	176,409
	13. Survei harga pedesaan	28,600	29,458	30,931	33,096	36,075
	14. Survei konstruksi	26,963	27,772	29,160	31,202	34,010
	15. Survei angkatan kerja nasional (sakernas) semesteran	102,939	106,027	111,329	119,122	129,842
	16. Survei angkatan kerja nasional (sakernas) tahunan	65,723	67,695	71,079	76,055	82,900
	17. Survei struktur upah	0,209	0,215	0,226	0,242	82,900

Program	Kegiatan	Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019
	18. Survei upah	1,519	1,565	1,643	1,758	1,916
	19. Survei sosial ekonomi nasional kor dan konsumsi tahun 2015	120,840	124,465	130,688	139,837	152,422
	20. Susenas panel 2015	2,645	2,724	2,861	3,061	3,336
	21. Survei sosial ekonomi nasional konsumsi dan MSBP tahun 2015	28,990	29,860	31,353	33,547	36,567
	22. Survei statistik politik dan keamanan	1,500	1,545	1,622	1,736	1,892
	23. Survei statistik badan usaha dan pasar modal	0,163	0,168	0,176	0,189	0,206
	24. Survei statistik keuangan pemerintah daerah	9,582	9,869	10,363	11,088	12,086
	25. Survei bidang jasa pariwisata	5,941	6,119	6,425	6,875	7,494
	26. Survei perusahaan peternakan dan RPH/TPH	4,369	4,500	4,725	5,056	5,511
	27. Survei perusahaan perikanan, TPI/PPI/PP	5,155	5,310	5,575	5,955	6,502
	28. Survei perusahaan	1,971	2,030	2,132	2,281	2,486

Program	Kegiatan	Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019
	Kehutanan					
	29. Survei pertanian tanaman pangan dan ubinan	49,497	50,982	53,531	57,278	62,433
	30. Survei hortikultura dan indikator pertanian	6,178	6,383	6,682	7,149	7,793
	31. Pelaksanaan supas 2015	240,380	247,591	259,971	278,169	303,204
	32. Pengolahan supas 2015	54,694	56,335	59,152	63,292	68,988
	33. Penggambaran peta BS bermuatan kegiatan ekonomi	49,016	50,486	53,011	56,722	61,827
	34. Pembentukan master frame blok sensus SE2016	4,962	5,111	5,366	5,742	6,259
	35. Persiapan publisitas SE2016	41,800	43,054	45,207	48,371	52,725
	36. Updating direktori usaha/perusahaan tahap II	4,300	4,429	4,650	4,976	5,424
	37. Pemutakhiran basis data terpadu 2015	1.017,5	1.048,0	1.100,4	1.177,5	1.283,4

Program	Kegiatan	Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis Lainnya BPS (DMPTTL)	1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan	2.008,364	2.490,371	2.540,179	2.590,982	3.212,813
	2. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	448,543	556,193	689,680	855,203	1.060,452
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA)	1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS	150,000	350,000	394,000	498,000	20,000

BAB V

PENUTUP

Renstra BPS Kabupaten Maluku Tenggara periode 2015-2019 disusun dengan mengikuti arah kebijakan pembangunan daerah RPJMD 2015-2019 yang membutuhkan ketersediaan data statistik berkualitas, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Produk dari BPS Kabupaten Maluku Tenggara tersebut dihasilkan oleh suatu proses dengan akuntabilitas yang jelas. Dengan demikian, Pengembangan Renstra BPS Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2015-2019 berfokus pada peningkatan kualitas dari tujuan BPS Kabupaten Maluku Tenggara, yakni:

1. Peningkatan kualitas data statistik
2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik
3. Peningkatan penyelenggaraan/pelayanan birokrasi yang akuntabel

Dalam Renstra BPS Kabupaten Maluku Tenggara 2015-2019, setiap tujuan strategis memiliki sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, arah kebijakan serta program dan kegiatan. Keberhasilan masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja yang dipantau dan dievaluasi dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja. Pelaksanaan pembangunan statistik dilakukan secara menyeluruh oleh BPS Kabupaten Maluku Tenggara melalui upaya mentransformasi seluruh kegiatan statistik dalam program Statcap Cerdas yang sudah dicanangkan dari BPS RI sampai BPS Kabupaten/Kota.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Renstra BPS Kabupaten Maluku Tenggara 2015-2019 membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran BPS Kabupaten Maluku Tenggara. Keinginan kuat untuk melakukan perubahan yang bersifat strategis di level BPS Kabupaten Maluku Tenggara merupakan bentuk nyata dari komitmen yang tinggi tersebut. Seluruh insan

statistik BPS Kabupaten Maluku Tenggara menyadari bahwa mereka memiliki komitmen yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan, serta memiliki budaya untuk menghasilkan kinerja tinggi sebagaimana yang tercermin dalam nilai-nilai organisasi BPS, yakni Profesional, berintegritas, dan amanah. Dengan modal ini, BPS Kabupaten Maluku Tenggara optimis bahwa seluruh target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Renstra BPS Kabupaten Maluku Tenggara 2015-2019 ini dapat diraih dan akan memberikan dampak kepada kesuksesan seluruh program pemerintah dalam RPJMD ketiga periode 2015-2019. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan Rahmat dan BerkatNya untuk memandu bakti BPS Kabupaten Maluku Tenggara kepada Nusa dan Bangsa.